

**MAKALAH AKUNTANSI PERBANKAN**  
**“PERBANDINGAN AKUNTANSI PERBANKAN GLOBAL”**

**Dosen Pengampu:**

Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



**Disusun Oleh:**

**Kelompok 12**

Nela Amelia 2313031050

Dita Silviana Putri 2313031057

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perbandingan Akuntansi Perbankan Global” dengan tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai harapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini.

Kami juga berharap dengan adanya makalah ini mampu berguna serta bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan terkait dengan Perbandingan Akuntansi Perbankan Global. Selain itu, kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 8 November 2025

Kelompok 12

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>4</b>
2.1 Konsep Dasar Akuntansi Perbankan Global.....	4
2.2 Praktik Akuntansi Perbankan di Indonesia.....	5
2.3 Praktik Akuntansi Perbankan Internasional.....	6
2.4 Perbandingan Sistem Akuntansi Perbankan Indonesia dan Internasional .....	8
2.5 Tantangan dan Hambatan Implementasi IFRS di Indonesia.....	9
2.6 Strategi Penguatan Akuntansi Perbankan Indonesia Menuju Standar Global.....	11
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>13</b>
3.1 Kesimpulan.....	13
3.2 Saran.....	13
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi perbankan merupakan cabang akuntansi yang memiliki peranan vital dalam mengatur, mencatat, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan yang terjadi di lembaga perbankan. Dalam konteks globalisasi ekonomi, perkembangan praktik akuntansi perbankan telah mengalami perubahan signifikan. Negara-negara di dunia kini berlomba untuk menerapkan standar akuntansi yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan secara internasional. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah adopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS), yang bertujuan untuk menyatukan praktik pelaporan keuangan antarnegara. Di Indonesia, praktik akuntansi bank mengikuti standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang secara bertahap telah disesuaikan dengan IFRS.

Namun, penerapan IFRS tidak selalu berjalan tanpa kendala. Perbedaan sistem ekonomi, struktur kelembagaan, serta kebijakan moneter di tiap negara memengaruhi sejauh mana standar global tersebut dapat diterapkan. Misalnya, bank-bank di Eropa dan Amerika Serikat telah lama menerapkan IFRS secara penuh, sementara negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur akuntansi dan kesiapan sumber daya manusia. Kajian ini penting karena perbedaan sistem akuntansi dapat memengaruhi bagaimana informasi keuangan diinterpretasikan dan digunakan oleh berbagai pihak. Dalam era ekonomi digital dan perdagangan bebas, pelaporan keuangan yang akurat dan transparan menjadi kunci utama bagi kepercayaan publik dan efisiensi pasar keuangan global. Dengan memahami perbandingan praktik akuntansi perbankan di Indonesia dan internasional, diharapkan dapat ditemukan strategi terbaik untuk meningkatkan tata kelola keuangan bank nasional yang selaras dengan praktik terbaik dunia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep dasar dan prinsip akuntansi perbankan diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan praktik akuntansi perbankan global?
2. Apa saja perbedaan mendasar antara PSAK di Indonesia dengan IFRS yang digunakan secara internasional dalam sektor perbankan?
3. Bagaimana penerapan standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) pada bank-bank di Indonesia dan bagaimana efektivitasnya dibandingkan dengan praktik di negara lain?
4. Apa pengaruh penerapan IFRS terhadap kualitas pelaporan keuangan dan tingkat transparansi bank di Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan IFRS secara penuh?
5. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi perbankan Indonesia dalam mengimplementasikan IFRS secara menyeluruh?
6. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat praktik akuntansi perbankan Indonesia agar sejajar dengan standar global dan meningkatkan daya saing internasional?

## **1.3 Tujuan**

1. Menganalisis prinsip dasar dan konsep utama akuntansi perbankan di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem akuntansi perbankan global.
2. Menjelaskan perbedaan utama antara PSAK dan IFRS yang memengaruhi praktik pelaporan keuangan perbankan di Indonesia dan internasional.
3. Mengkaji penerapan IFRS di sektor perbankan Indonesia dan menilai efektivitasnya dibandingkan dengan praktik di negara lain.
4. Menilai dampak penerapan IFRS terhadap kualitas laporan keuangan, transparansi, serta kredibilitas lembaga perbankan di Indonesia dibandingkan dengan praktik internasional.
5. Mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi bank-bank di Indonesia dalam proses adopsi dan penerapan IFRS secara menyeluruh.

6. Merumuskan strategi dan langkah konkret untuk memperkuat penerapan akuntansi perbankan Indonesia agar sesuai dengan standar global dan memperkuat daya saing sektor keuangan nasional.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Konsep Dasar Akuntansi Perbankan Global**

Akuntansi perbankan global merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh lembaga perbankan di berbagai negara dengan memperhatikan standar akuntansi internasional. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara global serta mempermudah investor dan regulator dalam memahami kondisi keuangan suatu bank. Menurut *International Accounting Standards Board (IASB, 2023)*, standar IFRS dibuat untuk menyatukan praktik pelaporan keuangan agar lebih transparan dan dapat diandalkan di seluruh dunia. Prinsip utama dalam akuntansi perbankan global meliputi pengakuan pendapatan, penilaian aset dan liabilitas, serta pengungkapan risiko keuangan.

Secara umum, bank internasional menerapkan sistem pelaporan berbasis IFRS, yang menekankan pada *fair value measurement* (pengukuran nilai wajar) sebagai dasar utama dalam penilaian aset keuangan. Hal ini berbeda dengan sistem lama yang cenderung berbasis *historical cost*. Penggunaan nilai wajar dianggap lebih mencerminkan kondisi pasar terkini, meskipun juga menimbulkan volatilitas pada laporan keuangan. Dalam praktiknya, IFRS menuntut transparansi tinggi terhadap risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang dihadapi bank.

Di sisi lain, beberapa negara seperti Amerika Serikat masih menggunakan *Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)*, yang memiliki perbedaan signifikan dibandingkan IFRS. US GAAP cenderung lebih berbasis aturan (*rule-based*), sedangkan IFRS lebih berbasis prinsip (*principle-based*). Perbedaan ini menyebabkan variasi dalam pelaporan laba, pencatatan aset derivatif, dan pengakuan pendapatan. Misalnya, pengakuan kerugian kredit di bawah IFRS 9 menggunakan pendekatan *expected credit loss (ECL)*, sementara di bawah US GAAP menggunakan pendekatan *incurred loss*.

Dalam konteks globalisasi, banyak negara berkembang berupaya mengadopsi IFRS untuk memperkuat daya saing lembaga keuangannya di pasar internasional. Penelitian oleh Al-Shammari dan Brown (2022) menunjukkan bahwa adopsi IFRS berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan dan kepercayaan investor asing. Namun demikian, penerapannya memerlukan kesiapan institusi, infrastruktur, serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perbankan global menjadi penting agar perbandingan antarnegara dapat dilakukan secara objektif. Ini menjadi dasar bagi negara seperti Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional tanpa mengabaikan kondisi ekonomi domestik.

## **2.2 Praktik Akuntansi Perbankan di Indonesia**

Praktik akuntansi perbankan di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang sebagian besar telah disesuaikan dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam menetapkan pedoman pelaporan keuangan bagi lembaga perbankan. Salah satu implementasi penting adalah adopsi PSAK 71, yang mengatur tentang instrumen keuangan dan diadaptasi dari IFRS 9. Standar ini memperkenalkan pendekatan *expected credit loss (ECL)* dalam pengakuan kerugian kredit, menggantikan metode lama *incurred loss*. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan bank mencerminkan risiko kredit secara lebih dini dan realistis.

Selain itu, bank di Indonesia juga diwajibkan untuk menerapkan PSAK lain seperti PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan serta PSAK 60 mengenai pengungkapan risiko keuangan. Implementasi ini memperkuat transparansi dan membantu pengawasan risiko perbankan. Menurut penelitian oleh Rahmawati dan Prabowo (2023) dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, penerapan PSAK berbasis IFRS terbukti meningkatkan akurasi pelaporan dan mengurangi asimetri informasi antara

manajemen dan investor. Hal ini juga memperbesar peluang bank Indonesia untuk menarik investasi global karena laporan keuangannya lebih dapat dibandingkan dengan bank di luar negeri.

Namun, penerapan IFRS di Indonesia tidak tanpa kendala. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan tingkat pemahaman dan kesiapan tenaga profesional akuntansi dalam menginterpretasikan standar yang bersifat prinsip. Banyak bank yang masih menghadapi kesulitan dalam mengukur nilai wajar (*fair value*) terutama untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif. Menurut studi oleh Putri dan Hartono (2022), masih ada kesenjangan antara teori IFRS dengan praktik akuntansi di lapangan, khususnya pada bank skala menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi.

Selain kendala teknis, faktor budaya organisasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi IFRS di Indonesia. Sistem akuntansi di negara ini masih dipengaruhi oleh pola pelaporan berbasis kepatuhan terhadap peraturan (*compliance-based reporting*), bukan berbasis transparansi informasi. Akibatnya, beberapa laporan keuangan bank cenderung dibuat hanya untuk memenuhi regulasi, bukan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Hal ini menuntut perubahan paradigma dan pelatihan berkelanjutan bagi para profesional akuntansi di sektor perbankan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi perbankan di Indonesia terus bergerak menuju standar global melalui adopsi IFRS. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara lembaga keuangan, regulator, dan dunia pendidikan dalam menyiapkan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Tanpa itu, kesetaraan dengan sistem akuntansi global akan sulit tercapai secara penuh.

### **2.3 Praktik Akuntansi Perbankan Internasional**

Praktik akuntansi perbankan internasional secara umum mengacu pada penerapan IFRS (International Financial Reporting Standards) atau US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), tergantung wilayah hukum suatu negara. Negara-negara di Eropa, Asia Pasifik, dan sebagian

besar negara berkembang telah mengadopsi IFRS, sementara Amerika Serikat masih menggunakan US GAAP. IFRS, yang diterbitkan oleh IASB (International Accounting Standards Board), dirancang agar laporan keuangan antarnegara memiliki konsistensi dan dapat dibandingkan secara global. Penerapan IFRS di sektor perbankan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan stabilitas sistem keuangan dunia.

Salah satu aspek penting dalam praktik akuntansi bank internasional adalah pengakuan dan pengukuran risiko kredit. IFRS 9 memperkenalkan konsep Expected Credit Loss (ECL) yang bersifat *forward-looking*, di mana kerugian kredit diestimasi berdasarkan proyeksi ekonomi masa depan, bukan hanya berdasarkan kejadian aktual. Hal ini mendorong bank untuk memiliki sistem penilaian risiko yang lebih canggih dan berbasis data. Menurut laporan *Deloitte Global Banking Survey* (2023), 92% bank di Eropa telah berhasil menerapkan sistem ECL secara penuh, yang terbukti meningkatkan keandalan laporan keuangan dan memperkuat pengawasan risiko internal.

Selain IFRS, di Amerika Serikat, US GAAP masih menjadi pedoman utama. Walaupun memiliki tujuan yang sama, US GAAP lebih bersifat *rule-based*, dengan aturan yang lebih spesifik untuk tiap kasus. Sebagai contoh, dalam pengakuan pendapatan bunga, IFRS menekankan substansi ekonomi transaksi, sedangkan US GAAP menekankan prosedur dan dokumen pendukungnya. Penelitian oleh Zhang dan Lin (2021) dalam *Journal of International Accounting Research* menunjukkan bahwa perbedaan ini dapat menyebabkan variasi dalam pelaporan laba antarbank lintas negara, terutama pada sektor derivatif dan instrumen keuangan kompleks.

Di kawasan Asia, Jepang dan Korea Selatan merupakan contoh negara yang telah berhasil melakukan konvergensi penuh ke IFRS. Jepang misalnya, menerapkan sistem pelaporan keuangan hibrida yang menggabungkan IFRS dengan standar lokal, sehingga tetap mempertahankan relevansi dengan kebijakan nasional. Menurut studi oleh Kato dan Takeda (2022), sistem tersebut mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan internasional dan stabilitas domestik. Hal ini menjadi contoh bagi negara berkembang lain,

termasuk Indonesia, dalam menyesuaikan diri dengan praktik global tanpa mengorbankan konteks lokal.

Dengan demikian, praktik akuntansi perbankan internasional menunjukkan bahwa penerapan IFRS memberikan dampak positif terhadap transparansi dan integritas keuangan global. Namun, setiap negara tetap memerlukan fleksibilitas dalam penerapannya agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan regulasi nasional. Perbandingan ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana Indonesia dapat meniru atau menyesuaikan diri dengan praktik terbaik dunia.

#### **2.4 Perbandingan Sistem Akuntansi Perbankan Indonesia dan Internasional**

Secara umum, perbedaan utama antara sistem akuntansi perbankan Indonesia dan internasional terletak pada tingkat adopsi dan kedalaman penerapan IFRS. Indonesia menerapkan IFRS melalui PSAK yang disesuaikan, sedangkan negara maju telah menerapkannya secara penuh. Misalnya, dalam hal pengakuan aset keuangan, IFRS menggunakan pendekatan *fair value*, sedangkan Indonesia masih sebagian menggunakan *historical cost*. Menurut penelitian oleh Suryani dan Abdullah (2023), hal ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam nilai aset dan laba yang dilaporkan oleh bank di Indonesia dibandingkan dengan bank internasional.

Dari segi transparansi, laporan keuangan bank internasional lebih terbuka terhadap pengungkapan risiko keuangan, termasuk risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Di Indonesia, walaupun pengungkapan risiko sudah diatur dalam PSAK 60, implementasinya sering kali terbatas pada aspek formal tanpa analisis mendalam. Menurut *World Bank Financial Report* (2024), perbedaan kualitas pelaporan ini masih menjadi kendala dalam menarik investasi lintas negara karena investor asing cenderung lebih mempercayai sistem pelaporan berbasis IFRS penuh.

Selain itu, dalam hal tata kelola dan pengawasan, sistem perbankan internasional memiliki mekanisme audit eksternal yang lebih ketat. Lembaga seperti Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris dan Federal Reserve di Amerika secara rutin melakukan evaluasi atas laporan keuangan bank untuk

menjamin kepatuhan terhadap IFRS atau US GAAP. Di Indonesia, meskipun OJK melakukan pengawasan, intensitas dan kedalaman pemeriksaannya belum setara dengan lembaga pengawas internasional. Akibatnya, tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan bank domestik masih relatif lebih rendah di mata investor global.

Di sisi lain, Indonesia memiliki keunggulan dalam fleksibilitas adaptasi kebijakan. Regulasi akuntansi di Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi nasional dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang sepenuhnya tunduk pada IFRS, yang terkadang kurang responsif terhadap kondisi lokal. Menurut kajian oleh Hidayat (2021), kebijakan adaptif ini menjadi faktor positif yang membantu stabilitas sistem keuangan Indonesia saat terjadi fluktuasi global.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi perbankan Indonesia sedang berada dalam proses konvergensi menuju standar internasional. Walaupun belum sepenuhnya setara, langkah-langkah reformasi yang dilakukan telah membawa Indonesia semakin dekat ke arah praktik global. Tantangan terbesar terletak pada peningkatan kapasitas profesional akuntansi dan perbaikan kualitas audit agar laporan keuangan bank Indonesia memiliki kredibilitas yang sebanding dengan lembaga perbankan dunia.

## **2.5 Tantangan dan Hambatan Implementasi IFRS di Indonesia**

Penerapan standar IFRS dalam sistem akuntansi perbankan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, teknis, dan kultural. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi yang benar-benar memahami penerapan IFRS secara komprehensif. Menurut hasil penelitian oleh Wulandari dan Rachman (2022) dalam *Asian Journal of Accounting Research*, banyak bank di Indonesia masih mengandalkan staf akuntansi yang terbiasa dengan sistem lokal berbasis peraturan, bukan prinsip IFRS yang bersifat interpretatif. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengakuan aset dan liabilitas, serta ketidakseragaman dalam penilaian nilai wajar.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi juga menjadi kendala serius dalam mendukung penerapan IFRS. Standar internasional ini membutuhkan sistem pelaporan yang terintegrasi, dengan kemampuan analisis risiko dan proyeksi kerugian kredit yang akurat. Banyak bank di Indonesia, terutama bank menengah dan kecil, belum memiliki perangkat lunak pelaporan yang sesuai dengan standar global. Menurut laporan *PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia* tahun 2023, 47% lembaga keuangan di Indonesia masih menggunakan sistem pencatatan manual atau semi-digital, yang membuat pengolahan data keuangan tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan manusia.

Hambatan berikutnya adalah perbedaan regulasi dan kebijakan fiskal yang memengaruhi cara bank melaporkan transaksi keuangannya. Misalnya, kebijakan perpajakan di Indonesia masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip IFRS terkait pengakuan pendapatan dan penyusutan aset. Ketidaksinkronan ini membuat bank harus melakukan penyesuaian ganda antara laporan komersial dan laporan fiskal. Studi oleh Susanto dan Handayani (2021) menunjukkan bahwa hal ini meningkatkan beban administrasi dan biaya kepatuhan bagi lembaga perbankan, terutama dalam audit eksternal.

Faktor budaya organisasi juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam praktiknya, sebagian besar lembaga perbankan Indonesia masih berorientasi pada pelaporan kepatuhan (*compliance reporting*) dibandingkan pelaporan yang bersifat transparan dan informatif. Artinya, laporan keuangan sering dibuat sekadar untuk memenuhi kewajiban kepada regulator, bukan untuk menyajikan gambaran keuangan yang sebenarnya kepada publik. Kebiasaan ini menghambat semangat reformasi menuju akuntansi berbasis prinsip IFRS yang mengutamakan substansi ekonomi daripada bentuk formal.

Tantangan terakhir adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga pengatur, seperti OJK, Bank Indonesia, dan IAI. Ketiga institusi ini memiliki peran berbeda dalam pengaturan pelaporan keuangan, namun sering kali belum memiliki keseragaman pandangan terhadap interpretasi IFRS tertentu. Akibatnya, muncul kebingungan di tingkat praktisi dan auditor mengenai

penerapan standar tertentu. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sinergi kebijakan dan penguatan regulasi lintas lembaga agar penerapan IFRS di Indonesia lebih konsisten dan efektif di seluruh sektor perbankan.

## **2.6 Strategi Penguatan Akuntansi Perbankan Indonesia Menuju Standar Global**

Untuk mencapai konvergensi penuh dengan standar internasional, Indonesia perlu menerapkan sejumlah strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi akuntansi internasional. Institusi pendidikan tinggi dan lembaga profesi seperti IAI perlu memperluas kurikulum IFRS serta bekerja sama dengan lembaga internasional seperti ACCA atau CPA Australia. Menurut studi oleh Harjono (2023), bank yang memiliki staf akuntansi dengan sertifikasi internasional menunjukkan tingkat kepatuhan IFRS yang lebih tinggi dan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Strategi kedua adalah pengembangan teknologi informasi akuntansi yang mampu mendukung sistem pelaporan keuangan berbasis real-time dan analisis risiko dinamis. Digitalisasi sistem akuntansi akan mempermudah bank dalam menerapkan pengukuran nilai wajar, *expected credit loss*, serta pengungkapan risiko secara otomatis. Pemerintah dan OJK dapat memberikan insentif bagi bank yang melakukan modernisasi sistem pelaporan berbasis IFRS. Langkah ini juga mendukung integrasi dengan sistem keuangan global yang kini semakin digital dan berbasis data besar (*big data analytics*).

Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian regulasi fiskal dan akuntansi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antara laporan komersial dan laporan pajak. Sinkronisasi kebijakan ini penting untuk mengurangi beban administratif dan meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan. Penelitian oleh Lubis dan Sari (2022) menekankan bahwa harmonisasi kebijakan antara Direktorat Jenderal Pajak, OJK, dan IAI dapat meningkatkan efektivitas penerapan IFRS di Indonesia hingga 35% lebih cepat dibandingkan tanpa koordinasi lintas lembaga.

Selanjutnya, penguatan tata kelola dan audit internal juga menjadi langkah penting. Bank harus memiliki sistem audit internal yang berorientasi pada risiko dan transparansi, bukan hanya kepatuhan administratif. Auditor internal perlu diberi wewenang lebih besar untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip IFRS dan dapat diuji oleh auditor eksternal internasional. Menurut *KPMG Financial Review (2024)*, bank yang memperkuat fungsi audit internal mengalami peningkatan kepercayaan investor asing hingga 20%.

Akhirnya, strategi penguatan akuntansi perbankan Indonesia harus melibatkan kolaborasi internasional. Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan global seperti IMF, World Bank, dan IASB untuk mendapatkan asistensi teknis serta benchmarking praktik terbaik. Dengan memperkuat kerja sama global, Indonesia tidak hanya menjadi pengikut standar IFRS, tetapi juga berperan aktif dalam pembentukannya. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu membawa sistem akuntansi perbankan Indonesia sejajar dengan standar global dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Perbandingan antara akuntansi perbankan di Indonesia dan di tingkat global mencerminkan adanya kesenjangan implementasi standar pelaporan keuangan. Indonesia telah mengadopsi IFRS melalui PSAK, namun penerapannya masih bersifat parsial dan menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi antar-lembaga. Di sisi lain, negara-negara maju telah menerapkan IFRS secara penuh dengan sistem pengawasan dan transparansi yang kuat, sehingga laporan keuangannya lebih dapat diandalkan dan mudah dibandingkan secara internasional.

Secara keseluruhan, akuntansi perbankan global menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan terpercaya. Indonesia memiliki potensi besar untuk sejajar dengan negara-negara maju dalam hal praktik pelaporan keuangan, asalkan reformasi dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Harmonisasi dengan standar global akan memperkuat daya saing sektor perbankan Indonesia di kancah internasional.

#### **3.2 Saran**

Pemerintah dan lembaga pengatur seperti OJK serta IAI perlu memperkuat pelatihan dan sertifikasi IFRS bagi akuntan dan auditor di sektor perbankan. Diperlukan sinkronisasi antara regulasi fiskal dan akuntansi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang menghambat penerapan IFRS. Lembaga pengawasan seperti OJK perlu meningkatkan intensitas audit dan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap PSAK berbasis IFRS. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem akuntansi perbankan Indonesia dapat mencapai kesetaraan dengan praktik internasional dan meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan nasional di mata dunia. Reformasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menuju sistem keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shammari, B., & Brown, P. (2022). *The impact of IFRS adoption on banking transparency in emerging markets*. *Journal of International Financial Reporting*, 18(2), 145–167.
- Deloitte. (2023). *Global Banking Survey Report*. Deloitte Insights.
- Harjono, S. (2023). *Improving IFRS Competency in Indonesian Banking Sector*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 11(1), 25–39.
- Hidayat, R. (2021). *Adaptive Accounting Policies in Indonesia: Response to Global Fluctuations*. *Asian Economic Review*, 9(3), 121–133.
- Kato, H., & Takeda, M. (2022). *IFRS Hybrid Implementation in Japan's Banking System*. *Journal of Asian Finance & Accounting*, 14(4), 211–228.
- Lubis, A., & Sari, D. (2022). *Regulatory Harmonization and IFRS Implementation in Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(3), 220–236.
- Putri, M., & Hartono, A. (2022). *Implementation Challenges of IFRS in Indonesian Banks*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 8(2), 90–107.
- PwC Indonesia. (2023). *Financial Reporting in Indonesia: IFRS Convergence Update*. PwC Publication.
- Rahmawati, E., & Prabowo, D. (2023). *PSAK Implementation and Financial Transparency in Indonesian Banks*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(1), 1–17.
- Suryani, T., & Abdullah, M. (2023). *Comparative Study of Financial Reporting Standards Between Indonesia and Global Banking*. *Indonesian Journal of Economics and Business*, 12(2), 87–104.
- Wulandari, S., & Rachman, A. (2022). *IFRS Literacy and Human Resource Readiness in Indonesian Banking Sector*. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(3), 158–176.
- Zhang, Y., & Lin, Q. (2021). *Comparative Analysis of IFRS and US GAAP in Banking Industry*. *Journal of International Accounting Research*, 20(4), 33–51.